

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gereja

Gereja dalam pandangan Yohanes Calvin, adalah perkumpulan orang-orang yang berdosa, dan pasti tidak suci, akan tetapi oleh anugerah (kasih karunia) Allah, gereja menjadi kudus artinya apa yang telah dilakukan oleh Allah. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menerima janji hidup kekal, tetapi juga untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah Yang Esa melalui Kristus, serta menjadi saksi yang mengalami kasih karunia Tuhan.⁴ Gereja hadir di tengah dunia dengan membuka ruang bagi jemaat untuk terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.⁵ Setiap anggota gereja merupakan bagian dari masyarakat, sehingga mereka yang dipanggil dalam gereja juga diutus untuk berperan di tengah masyarakat. Dalam pandangan John Calvin, keberadaan gereja di tengah dunia tidak hanya berorientasi pada kehidupan rohani semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Gereja dipandang sebagai alat yang dipakai Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, gereja tidak boleh memisahkan diri dari kehidupan sosial,

⁴ "L. Berkhof, Teologi Sistematis. Jilid 5 (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 7." 5 (n.d.). hlm. 1

⁵ Ibid, 3

melainkan dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan bermartabat. Melalui kesaksian iman, pelayanan serta tanggung jawab moral warganya, gereja berperan penting sebagai terang dan garam bagi dunia. Dengan demikian, keberadaan gereja tidak hanya dimaknai sebagai persekutuan orang percaya yang beribadah kepada Allah, tetapi juga sebagai komunitas yang diutus untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan melayani kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah berperan sebagai penyelenggara berbagai kebijakan dan program yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kehidupan sosial agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara teratur dan harmonis.⁶ Secara etimologis, istilah

⁶ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 11.

⁷ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 21.

pemerintah berasal dari bahasa Inggris *government* yang berakar dari bahasa Latin *gubernare* dan bahasa Yunani *kybernan* yang berarti mengarahkan, memimpin, atau mengendalikan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah dapat dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.⁷

Dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial, memfasilitasi pembangunan, serta membangun kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat demi terciptanya kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.⁷

Dalam penelitian ini, pemerintah yang dimaksud bukanlah pemerintah dalam pengertian negara secara umum, melainkan Pemerintah Lembang Saloso sebagai penyelenggara pemerintahan

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 17.

pada tingkat lokal. Pemerintah Lembang Saloso memiliki tanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat, mendukung pelestarian budaya lokal, menjaga ketertiban sosial, serta membangun kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk gereja dan lembaga adat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pemerintah dalam penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah lokal dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

C. Budaya Lokal

Budaya lokal atau kebudayaan dalam bahasa Indonesia berangkat dari padanan kata *Culture* kata yang berasal dari bahasa Inggris.⁸ Sehingga istilah ini kemudian melahirkan banyak definisi dari para teolog, para pemikir-pemikir kebudayaan sesuai dengan keilmuan dan kepentingan masing-masing. Secara etimologis, istilah *culture* berasal dari bahasa Latin *cultura*, yang bermakna menanam atau mengolah, khususnya dalam konteks pengolahan tanah.⁹ Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang mencakup berbagai unsur, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota

⁸ M.Sos Bainudin, S, Sos., *Pengantar: Kebudayaan Dan Peradaban* (Padang, 2023).Hlm. 1

⁹ Ibid, 1.

masyarakat.¹⁰Sementara itu, Ki Hajar Dewantara memandang kebudayaan sebagai hasil perkembangan budi manusia yang bergerak dari bentuk yang sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Kebudayaan, menurutnya, merupakan hasil perjuangan manusia dalam menghadapi dua kekuatan utama, yaitu alam dan zaman, yang tercermin dalam Upaya manusia mengatasi berbagai tantangan demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.¹¹

Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar dalam membentuk nilai, norma, dan pola perilaku yang mengatur kehidupan bersama. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar salah, serta bagaimana mereka harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. dalam masyarakat multikultural jelas bahwa budaya memainkan peran yang membawa nilai, norma, dan tradisi yang berkontribusi pada kebergerejaan dan masyarakat secara keseluruhan.¹² Selain itu budaya berfungsi menjaga keteraturan sosial, memperkuat identitas kelompok, serta membangun solidaritas di antara anggota masyarakat. Dalam praktiknya, budaya turut memengaruhi cara berpikir, bersikap dan berinteraksi termasuk dalam kehidupan bergereja dan hubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu,

¹⁰ Ibd. 1

¹¹ M.Si. Mutria, Dr. Farhaeni, S.E., *Etika Lingkungan dan Peradaban* (padang: 2023), Hlm. 1.

¹² Arinil Janah, *Jatidiri Dan Budaya Dalam Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta, 2023). Hlm.

budaya tidak hanya menjadi warisa tradisi, tetapi juga menjadi kekuatan yang membentuk dinamika kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Budaya lokal di masyarakat Toraja merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial yang hingga kini masih dipertahankan sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku, norma, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dalam konteks ini, budaya memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial serta memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat Toraja di tengah perubahan zaman.¹³

Secara lebih khusus, hal tersebut juga terlihat dalam kehidupan masyarakat di Lembang Saloso sebagai bagian dari masyarakat Toraja. Budaya Toraja yang masih kuat di Saloso sangat berperan dalam mengatur pola interaksi serta memengaruhi cara masyarakat mehami relasi antara gereja dan pemerintah. Nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam praktik bergereja dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, budaya yang masih kuat

¹³ Y. L. Buntu, "Peran Budaya Lokal Toraja dalam Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Sosiologi Gereja Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021.

perannya di Lembang Saloso memiliki fungsi penting dalam membentuk hubungan antara masyarakat, gereja dan pemerintah secara kontekstual.¹⁴

D. Teori Andreas Anangguru Yewangoe

1. Biografi Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe

Andreas Anangguru Yewangoe merupakan seorang teolog dan pendeta Kristen Indonesia yang lahir di Mamboru, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 31 Maret 1945. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran teologi publik di Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Yewangoe menempuh pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan lulus pada tahun 1969, kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, dan meraih gelar doktor pada tahun 1987 dengan disertasi berjudul *Theologia Crucis in Asia* yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Dalam perjalanan pelayanannya ia aktif sebagai pendeta di Gereja Kristen Sumba, dosen di Akademi Theologia Kupang, serta pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai organisasi gerejawi dan akademik baik di tingkat nasional maupun internasional, serta dikenal sebagai penulis dan

¹⁴ Y. L. Buntu, "Peran Budaya Lokal Toraja dalam Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Sosiologi Gereja Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021.

pemikir yang banyak memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai relasi gereja, masyarakat, dan pemerintah di Indonesia.

2. Pemikiran Andreas A. Yewangoe Tentang Relasi Gereja dan Pemerintah 1. Gereja Sebagai Mitra Gereja

Yewangoe dalam beberapa fokusnya sebagai seorang teolog merupakan teolog yang secara konsisten menaruh perhatiannya pada hubungan atau relasi gereja, negara dan masyarakat. Berbeda dengan pandangan yang menempatkan gereja hanya sebagai lembaga rohani yang berfokus pada urusan internal jemaat, Yewangoe mengatakan bahwa gereja di panggung untuk hadir dan terlibat langsung secara aktif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Bagi Yewangoe, gereja tidak dapat memisahkan diri dari realitas kehidupan publik karena gereja hidup di tengah masyarakat yang terus mengalami perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, keberadaan gereja harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan bersama.¹⁶ Pemikiran Yewangoe mengenai relasi gereja dan pemerintah berangkat dari keyakinan bahwa Allah bekerja tidak hanya melalui gereja, tetapi juga juga melalui berbagai institusi sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemerintah di pahami sebagai salah satu instrumen yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban,

¹⁵ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto: Gereja di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 112

¹⁶ Ibid. 111

keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, gereja di panggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kesaksian, pelayanan dan keterlibatannya dalam kehidupan publik.¹⁷

Walaupun gereja di panggil untuk membangun kerja sama dengan pemerintah, Yewangoe menekankan baha gereja tidak boleh kehilangan fungsi profetisny.¹⁸ Fungsi profetis merupakan tanggung jawab gereja untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kehendak Allah di tengah kehidupan masyarakat. Gereja tidak boleh hanya menjadi pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga harus memberikan kritik-kritik apabila terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Kristen.¹⁹ menurut Andreas A. Yewangoe gereja harus menjadi suara moral yang berani menyampaikan kebenaran sekalipun tidak selalu di terima oleh semua pihak. Kehadiran gereja dalam ruang publik bukan hanya untuk mendukung berbagai program pembangunan, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar tetap berjalan dalam lingkaran keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial bersama.²⁰ Fungsi profetis tersebut sangat penting karena gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

¹⁷ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009) Hlm, 87-88.

¹⁸ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto: Gereja di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 145.

¹⁹ Ibid. 145.

²⁰

Ketika muncul berbagai praktik yang merugikan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan ajaran Kristen, gereja tidak boleh diam. Sebaliknya, gereja harus hadir sebagai suara kenabian yang menyuarakan pembaharuan dan perubahan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik.²¹

Fungsi profetis tersebut sangat penting karena gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Ketika muncul berbagai praktik yang merugikan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan ajaran Kristen, gereja tidak boleh diam. Sebaliknya, gereja harus hadir sebagai suara kenabian yang menyuarakan pembaharuan dan perubahan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik.²²

Salah satu aspek penting yang kemudian menjadi dalam dari pandangannya Yewangoe, adalah hubungan gereja dan budaya. Menurutnya, gereja tidak dapat dipisahkan dari budaya karena ia hidup dan bertumbuh di tengah masyarakat yang memiliki atau terikat dengan budaya setempat.²³ Oleh karena itu gereja perlu memahami budaya setempat sebagai bagian dari konteks pelayanannya. Namun Yewangoe tidak hanya mendorong gereja untuk menerima unsur

²¹ Ibid. 146

²² Ibid. 146

²³ Andreas A. Yewangoe, *Theologia Crucis di Asia: Pandangan-pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan dalam Berteologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989) hlm. 250.

budaya secara mutlak. Gereja perlu melakukan penilaian kritis terhadap setiap praktik budaya berdasarkan ajaran ke Kristenan.

Budaya yang mengandung nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, penghormatan terhadap sesama, dan semangat kebersamaan dapat diterima serta dipelihara. Sebaliknya unsur budaya yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai ajaran Kristen perlu dikritisi dan ditransformasikan ulang.²⁴ Dalam pandangan Yewangoe, transformasi budaya bukan berarti menghapus budaya lokal, melainkan memperbaharui makna dan praktik budaya sehingga tetap relevan dengan nilai-nilai Injil. Dengan demikian, gereja dapat tetap menghargai warisan budaya masyarakat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip teologis yang terus dipertahankan dan dikembangkan.²⁵

Kemudian pemikiran Yewangoe dalam teologi publik, berangkat dari kritiknya terhadap gereja yang terlalu berfokus pada urusan internal. Menurutnya, gereja tidak boleh hidup dalam “ghetto” yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Gereja harus hadir di ruang publik dan mengambil bagian dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.²⁶ Pemikiran Yewango soal teologi publik menempatkan

²⁴ Ibid. 251

²⁵ Yewangoe, Andreas A. *Theologia Crucis di Asia: Pandangan-pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan dalam Berteologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989. hlm. 134.

²⁶ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto: Gereja di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 178

gereja sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. oleh sebab itu, gereja perlu terlibat dalam berbagai isu seperti kemiskinan, keadilan, pendidikan, lingkungan hidup, budaya, dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga dengan keterlibatan tersebut merupakan wujud nyata gereja dari panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia.²⁷ Melalui teologi publik gereja tidak hanya berbicara mengenai keselamatan pribadi, tetapi juga menjadi transformasi sosial yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Bagi Yewangoe, pemerintah merupakan salah satu institusi yang di pakai Allah untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, gereja memiliki panggilan untuk menghadirkan nilai-nilai moral dan spritual dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Gereja tidak dipanggil untuk mengambil alih tugas pemerintah, demikian pula pemerintah tidak dipanggil untuk mengambil alih tugas gereja, melainkan keduanya di

²⁷ Ibid. 175

²⁸ Ibid. 175

panggil untuk dapat membangun hubungan yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

E. Perspektif Teologis Relasi Gereja dan Pemerintah

1. Fungsi Profetis Gereja Terhadap Pemerintah

Menurut Yewangoe, gereja tidak hanya dipanggil untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab profetis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi profetis merupakan panggilan gereja untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, serta kehendak Allah di tengah kehidupan publik. Oleh karena itu, relasi gereja dengan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang hanya berorientasi pada dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai relasi yang tetap memberi ruang bagi gereja untuk menjalankan tanggung jawab moral dan kenabiannya. Yewangoe menegaskan bahwa gereja tidak boleh kehilangan identitas sebagai suara moral di tengah masyarakat. Ketika terdapat kebijakan, praktik sosial, maupun berbagai bentuk kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ajaran Kristen, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik yang bersifat membangun. Kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik dengan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kesetiaan gereja terhadap terpeliharanya kehidupan

bersama yang adil, bermartabat, dan menghargai martabat setiap manusia.

Berbicara mengenai relasi gereja dan pemerintah dalam perspektif teologis kristen selalu dikaitkan dengan bentuk pemerintahan di dunia yang memiliki kuasa atau *Exouisaie*.²⁹ dalam perspektif iman Alkitab, setiap bentuk kuasa termasuk kekuasaan yang dimiliki oleh dunia, pada dasarnya berasal dari Allah sebagai pencipta dan penguasa atas seluruh bangsa serta Tuhan atas sejarah manusia.³⁰ Oleh karena itu, keberadaan pemerintah tidak semata-mata lahir dari kehendak manusia, melainkan karena adanya otoritas yang di berikan dari atas. hal ini ditegaskan oleh Yesus Kristus kepada Pilatus bahwa tidak ada kuasa yang dimiliki seorang tanpa pemberian Allah (Yohanes. 19:11). demikian pula dengan Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan semua yang ada telah ditetapkan-olehNya (Roma. 13: 1).³¹ Namun demikian pengakuan bahwa kuasa pemerintah bersumber dari Allah tidak berarti bahwa setiap bentuk pemerintah selalu sejalan dengan kehendak-Nya. penekanannya terletak pada asal usul kuasa itu sendiri, yaitu bahwa seluruh otoritas pemerintah pada hakikatnya bersumber dari Allah, sebagaimana juga ditegaskan oleh Brownlee; "Walaupun adanya lembaga-lembaga itu sesuai dengan

²⁹ Sebuah Perspektif, Teologi Kristen, and Minggu Minarto Pranoto, "Relasi Gereja Dengan Negara," Hlm.3.

³⁰

³¹ Ibid. 4.

rencana Allah, bentuk dan pekerjaan setiap lembaga menjadi tanggung jawab manusia. Allah tidak memberikan kepada kita aturan masyarakat yang sudah jadi. Ia memberikan tugas mengatur. Dalam mengerjakan tugas itu, manusia wajib mengubah lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah memanggil kita untuk menciptakan struktur-struktur masyarakat yang lebih adil. Namun kita jangan lupa bahwa tugas kita adalah tugas mengatur, yaitu membentuk suatu masyarakat yang teratur.”³²

Relasi antara gereja dan pemerintah merupakan tema penting dalam kajian teologis sosial dan politik. Gereja tidak hanya berperan dalam membina spritual umat, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, gereja dipanggil untuk memberikan kontribusi moral melalui nilai-nilai Injil seperti keadilan, kebenaran dan kasih. Dalam hal ini gereja tidak hanya berbicara soal spritualitas tetapi juga terlibat dalam hal etis yang berhubungan dengan masyarakat.

Dalam tradisi politik Kristen, pemerintah dipahami sebagai tatanan yang berasal dari kehendak ilahi dan tetap diperlukan bahkan dalam kondisi manusia tanpa dosa.³³ Pemerintahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi masyarakat. Oleh karena itu,

³² Ibid. 5.

³³ Oey Natanael Winanto and Johnnie Manopo, “Relasi Gereja , Pemerintah, Dan Masyarakat : Etika Kristen Pada Ketaatan Dan Tanggung Jawab” 4, no. 1 (2023):hlm 4.

posisi sosial yang dimiliki oleh umat Kristen mengandung tanggung jawab serta panggilan penatalayanan untuk menjaga dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan yang telah ditetapkan..³⁴ Gereja Tuhan bukan tempat bersaing atau tempat mempromosikan gagasan teologisnya atau urusan kepentingan pribadi, tetapi gereja harus membangun relasi dengan organisasi-organisasi dunia itulah yang dikehendaki Allah.³⁵ Perlu dipahami bahwa tugas dan panggilan gereja ada 3 hal yang bersifat integral. Salah satunya adalah, diakonia yang berarti gereja tidak hanya pada lingkup gereja saja, tetapi gereja hadir dalam lingkup masyarakat untuk memberikan dampak entah berupa bantuan dan sebagainya sebagai konsep tubuh Kristus.

Salah satu hal yang membuat gereja penting membangun relasi yang baik dengan pemerintah (negara) adalah gereja adalah bagian dari Pemerintah atau dengan kata lain gereja adalah bagian dari masyarakat yang berkumpul dalam satu organisasi.³⁶ Sehingga menjadi hal yang wajar jika gereja melibatkan diri berdialog dengan pemerintah, membangun relasi, bahkan terlebih terlibat dalam politik. Tapi satu yang perlu di ingat dari pernyataan Andreas A. Yewangoe bahwa gereja tidak boleh berdiri di atas pemerintah(pemerintah), kemudian pemerintah tidak boleh berdiri di atas gereja, kemudian gereja dan

³⁴ Ibid. 4.

³⁵ Ibid. 6. ³⁶

Ibid. 9.

pemerintah terpisah dengan tugasnya masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu, untuk kesejahteraan semua umat manusia.³⁶

Bagi Paulus gereja tidak harus berkesimpulan bahwa negara, sebagai hamba Allah memegang pedang, malahan gereja harus menyadari bahwa pemerintah bisa menjadi sebuah instrumen dalam menyatakan suara kenabian, atau juga dalam tanggung jawab profetis. Oleh sebab itu gereja perlu untuk hadir dan mendukung program-program pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya.³⁸ Gereja yang juga terlibat dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, membantu pengungsi dan korban konflik, serta mendukung kebijakan yang lebih adil dan ramah lingkungan.

Bagi Yewangoe sendiri, relasi antara gereja (gereja) dan pemerintah(pemerintah) harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat. Yewangoe menekankan bahwa gereja tidak boleh menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang mendominasi negara, tetapi juga tidak boleh menarik diri dari kehidupan publik. Gereja dipanggil untuk hadir secara kritis dan profetis di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang bersumber dari iman Kristen.

³⁶ Ibid. 14. Teologi, Kontekstual, and Adiprasetya, "Nabi Dan Sahabat : Teologi Publik Sebagai Keterlibatan Simbolis."

Dalam hal ini, gereja menghormati pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama gereja tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengkritik ketika kekuasaan negara menyimpang dari prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.